



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama : INNAHA RAHMAWATI
- Jabatan : AUDITOR MUDA
- NHK : 976932

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.000.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/80 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 142.000.000

- MOTOR, HONDA DIA02N18MI A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
- MOTOR, HONDA F1C02N46LO A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
- MOBIL, SUZUKI AV1414FDX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 31.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 159.500.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.332.500.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.332.500.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.